



Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama

Yeni Sri Lestari

Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

yenilestari24@yahoo.com

Abstract

Democratization that upholds freedom is the basis for every individual in actualizing himself, including in political matters. Individual freedom guaranteed by the constitution in Indonesia reflects the high popularity of this democratic system. However, this freedom ultimately further clarifies the gap between identities (religion, ethnicity, language, gender, etc.) that exist in Indonesia, especially in relation to the nation's political issues. The issue of national religion and nationalism is two identities that are currently being debated in Indonesia. The politics of identity politics is getting tighter until the emergence of the truth claim that one interest group is better than other interest groups, this matter of interest then begins to divide the nation that previously upheld differences. This article aims to find out the reality of identity politics in Indonesia today, focusing to two identity groups namely religious groups and nationalist groups. Qualitative methods and literature studies are used to examine this issue. This study found that the divisions that emerged because of political groupings based on religious identity and nationalism led to disruption of state stability which was marked by the emergence of a crisis of trust in the government, the spread of hoax news, persecution, treason, limited democratic space, etc.

Keywords: identity politics, nationalism, religion, Indonesia

Abstrak

Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu dalam mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Akan tetapi, kebebasan tersebut pada akhirnya semakin memperjelas jurang pemisah antar identitas (agama, suku, bahasa, jenis kelamin, dll) yang ada di Indonesia, terutama berkaitan dengan persoalan politik bangsa. Persoalan agama dan nasionalis bangsa merupakan dua identitas yang saat ini menjadi perdebatan di Indonesia. Polemik politik identitas semakin meruncing hingga munculnya klaim kebenaran bahwa kelompok kepentingan yang satu lebih baik daripada kelompok kepentingan lainnya, urusan kepentingan ini kemudian mulai memecah belah bangsa yang sebelumnya menjunjung tinggi perbedaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui realita politik identitas di Indonesia saat ini, berfokus kepada dua kelompok identitas yaitu kelompok agama dan kelompok nasionalis. Metode kualitatif dan kajian 19aker19c191919

digunakan untuk mengkaji persoalan ini. Kajian ini menemukan bahwa perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita *hoax*, persekusi, 20aker, terbatasnya ruang demokrasi, dll.

Kata kunci: politik identitas, nasionalis, agama, Indonesia

PENDAHULUAN

Peningkatan sistem demokrasi yang terus menerus dicanangkan oleh berbagai pihak dalam sistem pemerintahan di Indonesia nyatanya tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin setiap hak yang dimiliki oleh warga negara, sehingga kebebasan merupakan 20aker20c20202020 pemerataan kesempatan bagi setiap individu di dalamnya.

Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya terus berdinamika dengan persoalan keanekaragaman yang seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok. Perbedaan atas dasar keragaman di Indonesia telah banyak mencatatkan sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku, dll.

Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan saja sebagai konflik antar satu identitas melainkan telah memasuki babak baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas tersebut seringkali kita jumpai sebagai bagian dari proses demokratisasi, yang lebih tepatnya dikatakan sebagai “demokrasi liar”.

“Demokrasi liar” tidak terbatas pada konsep demokrasi yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi ketidakterbatasannya kebebasan yang diberikan oleh demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menciptakan huru hara tanpa henti, bahkan tanpa segan telah menyentuh ranah keyakinan kelompok beragama. Perbedaan pendapat dan pandangan lintas agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isu politik masa kini.

Permasalahan ini kemudian diperkeruh dengan kehadiran kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dll. Ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan ketegasan berkaitan arah politik identitasnya.

Pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama saat ini semakin meruncing hingga mengganggu stabilitas negara. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik antara kedua-dua kelompok identitas ini melahirkan berbagai isu dan menjadi 20aker20c bagi masyarakat luas yang disebabkan dengan hadirnya propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran

identitas yang mereka yakini hingga menjurus kepada munculnya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah.

Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sebagai negara yang dilatarbelakangi oleh berbagai keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara.

Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri. Suparlan (2004: 25) mengartikan identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Penggabungan ke dalam kelompok atau golongan tertentu ini tentu tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas. Identitas atau jati diri ini terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama, suku, profesi, dll. Sehingga perkumpulan yang didasarkan pada satu kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas.

Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan.

Politik identitas mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai kalangan pertama kalinya di Amerika Serikat berkaitan dengan diskriminasi yang sangat kental antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam. Perlakuan kasar, pemerasan hingga intimidasi yang dialami oleh warga kulit hitam di Amerika menimbulkan pentingnya politik identitas untuk memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam dalam dominasi negara dan pemerintah.

Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Agnes Haller (1995) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang 21aker perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama.

Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pemiarian terhadap konflik yang dilatarbelakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan negara.

Manuel Castells (2003: 7-8) mendefinisikan identitas dalam politik identitas berasal dari instusi dominan yang mengakui dan menginternalisasi kelompok tertentu melalui 22aker dan stereotip pada diri mereka. Castells lebih lanjut mengidentifikasi konstruksi identitas melalui 3 model, yaitu:

No.	Model	Keterangan
1.	<i>legitimizing 22aker22c22</i> atau legitimasi identitas	Identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
2.	<i>Resistance identity</i> atau resistensi identitas	Identitas yang dilekatkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain. Konstruksi identitas ini kemudian dikatakan oleh Coulhoun sebagai politik identitas.
3.	<i>Project identity</i> atau proyek identitas	Konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

Tabel 1. Model Konstruksi Identitas

Sumber: disusun oleh penulis

Konstruksi politik identitas di Indonesia telah muncul dan menemukan kekuatannya semenjak zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Persamaan identitas sebagai warga negara yang merdeka melahirkan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan politik identitas mereka dalam menyelenggarakan praktik ketatanegaraan.

Bukan saja nasionalisme menjadi tolak ukur utama dari politik identitas di Indonesia pada masa itu. Perjuangan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat muslim juga turut memberikan kontribusi yang begitu besar bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Bukan sekedar teatrikal belaka bahwa umat muslim ingin menjadikan identitas keagamaan yang diyakininya sebagai superior dalam tatanan kenegaraan, tetapi sejarah panjang telah

membuktikan bahwa nasionalisme dan Islam di Indonesia telah lama berdampingan dan menciptakan hubungan yang harmonis.

Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas. Tidak terkecuali di Indonesia, pemahaman mengenai demokrasi liberal yang mengagungkan Pancasila di atas segalanya menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi keragaman yang ada di Indonesia terutama terhadap agama minoritas. Hal ini pada akhirnya berujung pada konflik politik.

Kajian politik secara jelas membedakan antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* diartikan sebagai konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan *political of identity* merupakan mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Muhtar Haboddin, 2012: 119). Kajian mengenai politik identitas meliputi dua kategori identitas yang diakui yaitu identitas sosial dan identitas agama sebagai subjeknya.

Identitas sosial meliputi identitas keagamaan, kelas, ras, etnis, gender dan seksualitas, di mana identitas sosial menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi sosialnya. Sedangkan identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, di mana identitas politik ini menentukan posisi individu di dalam sebuah komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*) (Fitri Ramdhani Harahap, 2014: 803-804). Persoalan politik identitas ini kemudian lebih ditujukan sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan.

Pemaknaan politik identitas sebagai alat politik diungkapkan oleh Kemala Chandakirana yang menyatakan bahwa politik identitas digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan (Muhtar Haboddin, 2012: 120). Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik identitas hanyalah alat yang digunakan penguasa untuk memanipulasi dan menggagal kekuasaan bagi pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Hal tersebut tidak lain merupakan suatu kecenderungan yang mutlak bagi pemimpin yang berkuasa.

Klaus Von Beyme (Muhtar Haboddin, 2012: 120-121) menyebutkan bahwa ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, seperti yang terdapat dalam 23aker berikut:

No.	Karakteristik	Keterangan
1.	1	Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang pada prinsipnya di tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-

		faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya.
2.	2	Gerakan politik identitas memiliki suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar.
3.	3	Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.

Tabel 2. Karakteristik Politik Identitas

Sumber: disusun oleh penulis.

Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, politik identitas yang saat ini menjelma dalam dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum muslim, apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara.

Pertentangan antara kedua-dua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki *political will* dalam menengahi isu ini. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan melainkan juga kepentingan masyarakat luas, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan.

Kajian yang dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap (2014) dengan judul *Politik Identitas Berbasis Agama* mengemukakan bahwa kemajemukan identitas di Indonesia terancam dengan adanya politik identitas yang mengarah kepada penghancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan. Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan.

Kajian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap. Persamaan kajian terletak pada persoalan politik identitas yang menjadi isu utama dalam sistem pemerintahan sehingga menyebabkan munculnya konflik. Sedangkan perbedaan kajian terletak dari substansi keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas melainkan

identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini.

Selain itu, kajian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif (2012) yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia* menyatakan bahwa politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Politik identitas yang mengatasnamakan agama (Islam) seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan PKS (Partai Keadilan Sosial) ini membahayakan posisi nasionalisme dan Indonesia, dimana seharusnya Pancasila diusung sebagai prinsip/pegangan/proporsi dasar bersama bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa depan. Hal ini dikarenakan Pancasila sesuai dengan konsep yang menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia seperti etnis, bahasa lokal, agama dan latar belakang sejarah. Sedangkan identitas agama (Islam) tidak mencakup kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, politik identitas tidak akan membahayakan selama cita-cita pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional sejalan dengan Pancasila sebagai dasar filosofi negara bukan kepada agama mayoritas (Islam).

Persamaan penelitian antara penulis dan Ahmad Syafii Maarif terletak kepada pembahasan politik identitas terhadap rasa nasionalisme bangsa. Adapun perbedaan penelitian terletak pada pokok pembahasan mengenai agama (Islam) yang dimaksud oleh Maarif sebagai ancaman bagi di Indonesia, tetapi dalam kajian penulis identitas agama (Islam) merupakan pondasi tegaknya identitas nasionalisme bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2002) yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan tetapi menekankan kepada karakter alamiah sumber data. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan cara menganalisis persoalan politik identitas di Indonesia berdasarkan isu nasionalisme dan isu agama. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang dikaji berkaitan dengan persoalan politik identitas antara identitas nasionalisme dan identitas.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan pengumpulan data studi pustaka menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisis data menggunakan penggambaran, penuturan, dan menguraikan data yang bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi; pencatatan dan menelaah hasil

dari data yang telah diperoleh dari berbagai sumber; mengumpulkan, memilah, mensintesis, mengikhtisar dan mengklasifikasikan data sesuai rumusan masalah; data yang telah dikategorikan kemudian dianalisis untuk mencari makna, hubungan dan mengaitkan temuan-temuan yang sudah ada dengan rumusan masalah.

Analisis data kemudian diuji keabsahannya untuk mendapatkan data yang valid menggunakan teknik Trianggulasi, yaitu sumber data yang sudah ada dibandingkan keakuratannya dengan metode yang dipilih kemudian dibandingkan kembali dengan penelitian lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas di Indonesia dihiasi dengan beragam isu mengenai pertentangan antara kaum yang mengusung identitas nasionalisme dan kaum yang mengusung identitas agama. Dalam persoalan ini muncul sebuah klaim kebenaran antara keduanya mengenai keunggulan atau eksklusivisme dari masing-masing identitas yang mereka gaungkan. Ditilik lebih mendalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini telah membuktikan bahwa landasan keagamaan (Islam) telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi terbentuknya bangsa Indonesia, tidak terkecuali dengan dibentuk dan disepakatinya Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun begitu, perebutan kekuasaan politik telah kembali mengulang sejarah kelam dengan menjadikan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda kekuasaan.

Keyakinan beragama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan hal yang sakral, yaitu agama dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari persoalan mengenai kenegaraan. Namun, dengan menjamurnya paham sekuler, pluralis, dan liberalis yang mengaungkan pemisahan antara negara dan agama serta menjunjung tinggi konsep sakral, sedikit demi sedikit mulai mengikis persatuan antar umat beragama di Indonesia khususnya antar muslim bahkan menghancurkan solidaritas yang terbentuk antar keragaman dalam wadah nasionalisme.

Persoalan nasionalisme jauh sebelumnya telah dimaknai bersama sebagai semangat antar suku, agama, ras, kelas, dll di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang menciptakan integrasi harmonis hingga tercapailah kemerdekaan Indonesia atas dasar kerjasama antar keragaman tersebut. Namun saat ini, nasionalisme lebih dipandang sebagai solidaritas nasional dari kelompok-kelompok minoritas yang merasa terintimidasi dengan kelompok agama mayoritas.

Persoalan terpecahnya politik identitas di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang dimotori oleh elit politik untuk mendapatkan hingga mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik identitas di Indonesia. Perpecahan antara kelompok nasionalis dan agama dianggap mampu memberikan peluang bagi menutupi ketidakmampuan

pemerintahan yang berkuasa saat ini dalam menangani isu-isu kenegaraan terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat luas menyebabkan munculnya kepentingan politik guna menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik. Berbagai kebijakan yang banyak memunculkan 27aker27c di masyarakat antara lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga bahan pokok makanan, kenaikan nilai tukar rupiah, dll. Pertentangan antar politik identitas di Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim pemilihan umum (pemilu) yang cenderung membawa-bawa persoalan keagamaan harus dipisahkan dengan persoalan negara. Berujung kepada kasus penistaan agama, menjadikan kelompok agama minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Polemik ini kemudian berlanjut hingga kepersoalan yang sangat subtansif untuk tidak mencampuradukan agama ke dalam persoalan politik. Penyelenggaraan pemilu acapkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, hingga agamapun menjadi korbannya.

Proses pemilu inilah yang menjadi titik utama berkembangnya perpecahan antara semangat nasionalisme dengan keagamaan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana ditambah dengan kerakusan untuk mempertahankan kekuasaan menjadikan politik identitas sebagai kendaraan yang paling ampuh untuk mendapatkan suara rakyat. Penggiringan dan pembentukan opini publik melalui media massa mengenai semangat keberagaman dan nasionalisme telah memecahbelah kehidupan berbangsa. Padahal tidak dapat dipungkiri, bahwa agama mayoritas di Indonesia telah lama mengamalkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, seperti disetujuinya Pancasila sebagai landasan negara hingga toleransi dalam beragama dengan mengakui keberadaan agama minoritas.

Isu-isu mengenai politik identitas harus dilihat siapa, apa dan bagaimana kepentingan itu mendasarinya. Kepentingan kelompok elit yang menggunakan politik identitas untuk mengangkat kembali isu primordialisme dengan menjebak fanatisme seseorang atau kelompok dalam hal keagamaan telah melahirkan perpecahan yang begitu besar dan menjadi ancaman bagi nasionalisme negara. Pertentangan politik identitas kemudian diperkeruh dengan berbagai pemberitaan di media massa yang saling menuding kebenaran dan kesalahan dari kedua belah pihak. Peningkatan jumlah pemberitaan, bahkan dalam hitungan menit menyebabkan tidak terkendalinya isu mengenai politik identitas dan memunculkan persoalan baru tentang penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya bahkan sebegini besar berisi kebohongan (*hoax*).

Hoax ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar bagi meruncingnya pertentangan antara kelompok nasionalis dan agama.

Terpancingnya kelompok masyarakat awam dengan pemberitaan *hoax* menyebabkan masyarakat mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kembali rasionalitas dan kebenarannya, hal ini kemudian berujung kepada maraknya aksi persekusi dan 28aker yang saling menjatuhkan pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya.

Ketidaktepatan arah kebijakan dalam menangani pertentangan politik identitas ini dapat menyebabkan matinya penegakkan demokrasi di Indonesia. Sehingga segala bentuk perpecahan yang mungkin ditimbulkan dari kedua kelompok politik identitas ini harus dapat diminimalisir melalui peran pemerintah dan juga masyarakat. Seharusnya keragaman yang ada di Indonesia dijadikan sebagai wadah persatuan yang memiliki nilai perbedaan yang membangun, bukan sebaliknya.

Political will dari pemerintah Indonesia menjadi solusi utama untuk mengakhiri konflik yang terjadi antar kedua kelompok politik identitas ini. Kedaulatan negara hanya tercapai dengan mengutamakan kepentingan nasionalisme negara yang didalamnya terdapat semangat keragaman antar agama, suku, ras, kelas dll. Kemandirian pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mencerminkan keberhasilan pemerintah karena mampu membentuk kebijakan yang sepenuhnya bagi kedaulatan warga negaranya bukan atas dasar intervensi asing yang mengusung demokrasi seluas-luasnya melalui paham sekuler, pluralis dan liberal dengan mengabaikan fakta sejarah kebangsaan.

KESIMPULAN

Perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita *hoax*, persekusi, 28aker, terbatasnya ruang demokrasi, dll. Substansi dari keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini. Identitas agama (Islam) merupakan salah satu pondasi tegaknya identitas nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga seharusnya politik identitas di Indonesia harus ditanggapi dengan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya pada publik untuk membuktikan bahwa agama (Islam) dan nasionalisme sejalan dan memiliki tujuan yang satu, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia, bukan membiarkan pertentangan antar keduanya semakin meluas dengan menghadirkan kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2003). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Blackwell Publishing: Australia.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, Hal. 109-126*.
- Harahap, FR. (2014). Politik Identitas Berbasis Agama. *Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*. Yogyakarta.
- Heller, A dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical Ideologies an Their Impact on the New Social Movements*. A New Handbook of Political Societies. Blackwell Oxford.
- Heyes, C. (2007). *Identity Politics* Stanford Encyclopedia of Philosophy. Diakses 13 September 2018, dari: Plato.Stanford.edu/entries/identitypolitics.
- Maarif, AS. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Democracy Project: Jakarta.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press: Jakarta.
